

DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI DI SEKOLAH SMP (PERSPEKTIF ORANG TUA DAN EVALUASI IMPLEMENTASI)

Rita Kartika Murni¹, Hartini Haritani²
Universitas Hamzanwadi^{1,2}
ritakartikamurni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi orang tua terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di Kecamatan Selong dan untuk memahami dampak implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus deskriptif pada SMP Negeri di Kecamatan Selong, menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap kebijakan zonasi berhasil menciptakan pemerataan siswa di berbagai jenis sekolah. Awalnya, aturan pemerintah mengurangi jumlah siswa dan menghindari peningkatan yang tidak terkendali. Dampak positif bagi wali murid adalah kemampuan untuk mengontrol anak-anak dengan baik karena dekatnya jarak tempat tinggal, sementara tujuan kebijakan zonasi adalah mencegah kuantitas siswa di sekolah tertentu. Namun, ada dampak negatif, yaitu kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak berkompotensi tinggi tidak mendapatkan kesempatan di sekolah favorit, menyebabkan kekecewaan terhadap kebijakan ini yang dianggap mengurangi kualitas pendidikan.

Kata kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonasi

ABSTRACT

This study aims to investigate parents' perceptions of the zoning policy in the New Student Admission of State Junior High Schools in Selong Sub-district and to understand the impact of the policy implementation. The research uses a qualitative approach with a descriptive focus on public junior high schools in the Selong sub-district, using data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and data analysis through data reduction. The results showed that parents' perceptions of the zoning policy created an equal distribution of students in different types of schools. Initially, government rules reduced the number of students and avoided an uncontrolled increase. The positive impact for student guardians is the ability to control children well due to the proximity of residence, while the purpose of the zoning policy is to prevent the number of students in a particular school. However, there is a negative impact, namely parents' concerns that highly competent children do not get opportunities in their favorite schools, causing disappointment with this policy which is considered to reduce the quality of education.

Keywords: New Student Admission, Zoning

PENDAHULUAN

Zona, dalam konteks perkotaan, merujuk pada wilayah dengan fungsi dan karakteristik lingkungan tertentu. zoning, sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang,

membagi lingkungan kota menjadi zona-zona dengan aturan yang berbeda-beda (Bahri *et al.*, 2020; Launuha *et al.*, 2021; Murcahyanto, 2023). Peraturan Zonasi mengatur klasifikasi zona, penggunaan lahan, dan prosedur pembangunan. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menentukan penerimaan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal di Kartu Keluarga (Mallevi Agustin Ningrum *et al.*, 2022; Rahmawati & Muflhatin, 2019; Safitri & Yusran, 2021). Meskipun bertujuan memberikan afirmasi kepada anak-anak tidak mampu, sistem ini memunculkan kekisruhan di beberapa daerah, menyebabkan sekolah kelebihan atau kekurangan kuota. aturan zonasi, seperti yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, menetapkan penerimaan siswa berdasarkan domisili dan memastikan penerimaan siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar minimal 20% (Azis *et al.*, 2022; Junaedy *et al.*, 2021).

Kontroversi muncul di beberapa daerah, termasuk Lombok, terkait dampak kebijakan ini. Sistem zonasi diatur dalam Pasal 15 dan 16 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Bagian Keempat. Pasal 15 menyatakan bahwa sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus menerima calon peserta didik yang berasal dari zona terdekat sekolah sebanyak minimal 90% dari jumlah total peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik, seperti dijelaskan dalam ayat (2), merujuk pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona terdekat, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3), ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, berdasarkan daya tampung sekolah dan jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut (Bintoro, 2018; D. C. S. Ishak, 2020; Oktafiana *et al.*, 2019).

Bagi sekolah di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, persentase dan radius zona terdekat dapat diatur melalui kesepakatan tertulis antar pemerintah daerah yang berbatasan, sesuai dengan ayat (4). Selain itu, ayat (5) memberikan kewenangan kepada sekolah pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi dan jalur khusus, masing-masing hingga 5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima (Permendikbud, 2018). Program afirmasi telah diterapkan untuk memastikan akses sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, sejalan dengan prinsip bahwa sekolah negeri didanai oleh pajak masyarakat dan harus memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri (Dwi Gustiani, Aufarul Marom, 2022; Santoso & Ambarwati, 2020; Widayanti, 2022). Sistem zonasi diimplementasikan dengan tujuan agar siswa dapat diterima di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, sistem zonasi juga dirancang untuk melindungi warga yang kurang mampu, dan sekaligus memberikan tantangan bagi warga yang memiliki prestasi belajar, terutama ketika memilih sekolah favorit (Dewi, 2020; Junika & Syam, 2022)

Dampaknya, beberapa masyarakat merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah mengenai zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, terutama di beberapa daerah, termasuk Kecamatan Selong di Lombok. Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan kuota di beberapa sekolah, di mana ada yang kelebihan kuota dan tidak dapat menampung siswa lebih lanjut, sementara di tempat lain ada sekolah yang mengalami kekurangan

murid. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa beberapa siswa miskin dan berprestasi tidak dapat diterima dalam sistem ini.

Penelitian terkait dengan masalah tersebut telah banyak dilakukan antara lain oleh Syusilayarni et al., (2021) yang meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru melibatkan tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Faktor penghambat melibatkan sosialisasi yang kurang optimal, kendala teknis, dan ketidakpahaman calon peserta didik, sementara dampaknya mencakup pemerataan kualitas sekolah dan kemudahan akses, tetapi juga keterbatasan pilihan dan motivasi belajar yang rendah.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (I. Ishak et al., (2022) tentang Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Hasil penelitian di SMP Negeri 2 Sungguminasa mengidentifikasi empat aspek kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai skala prioritas dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Dampaknya mencakup aspek positif seperti keuntungan bagi calon peserta didik dan pemerataan pendidikan, tetapi juga menunjukkan dampak negatif seperti penurunan motivasi anak, heterogenitas siswa, penyalahgunaan SKTM, penyalahgunaan jabatan orang tua, tantangan dalam menyamakan budaya disiplin siswa, dan ketidaksesuaian dengan KK. Stakeholder internal menyatakan dukungan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar, menantang guru dan sekolah, menghemat biaya transportasi, dan mengubah persepsi masyarakat tentang sekolah favorit. Di sisi lain, dukungan dari stakeholder eksternal termasuk memberikan kesempatan bagi siswa sekitar untuk masuk ke sekolah negeri, mengurangi kemacetan, dan mempermudah transportasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui persepsi orang tua dan dampak kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kecamatan Selong. Persepsi, sebagai tahap awal dalam memproses informasi, melibatkan penggunaan pengetahuan dari ingatan untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap persepsi orang tua dan dampak kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kecamatan Selong. Penelitian ini memasukkan pemahaman mendalam tentang persepsi sebagai tahap awal dalam memproses informasi, yang melibatkan penggunaan pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus. Dengan memusatkan perhatian pada konsep ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru untuk memahami bagaimana orang tua menghadapi kebijakan zonasi di tingkat SMP Negeri, memberikan wawasan yang lebih khusus dan relevan dalam konteks penerimaan siswa baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran, pendapat, dan perilaku subjek dan objek penelitian.

Metode ini menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan, fokus pada latar belakang dan individu secara holistik. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Selong, Lombok Timur. Subjek penelitian melibatkan individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi, dengan menggunakan *Purposive Sampling* untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik (siswa) tingkat SMP.

Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan sebagai pengamat independen, wawancara tidak terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui informasi yang akan diperoleh, dan dokumentasi melibatkan barang-barang tertulis dan informasi yang diperoleh melalui foto atau gambar kegiatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diukur melalui validitas internal (*credibility*), kebergantungan (*dependability/reliabilitas*), dan kepastian/objektivitas (*confirmability*) untuk memastikan keterkaitan hasil dan proses penelitian.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki dampak kompleks yang melibatkan aspek-aspek positif dan negatif, serta tantangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan kualitas dalam sistem pendidikan.

Dampak Positif Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Pemerataan Peserta Didik

Kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru memberikan dampak positif dengan menciptakan pemerataan peserta didik di antara berbagai satuan pendidikan. Ini sejalan dengan prinsip keseimbangan yang diadvokasi oleh teori Talcott Parson, yang bertujuan menghindari ketidakseimbangan jumlah siswa di setiap sekolah dan menekankan keseimbangan agar tidak ada sekolah dengan rombongan belajar yang berlebihan. Kebijakan ini menguntungkan sekolah negeri dan swasta, menghasilkan pemerataan dalam penerimaan siswa baru.

2. Keuntungan untuk Sekolah Negeri dan Swasta

Dampak positif juga terlihat pada pemerataan siswa baru di sekolah negeri maupun swasta. Keseimbangan ini memberikan keuntungan bagi semua jenis sekolah, menghindari kondisi rombongan belajar yang berlebihan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kelas. Dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru di Kecamatan Selong, penerapan zonasi memberikan dampak positif terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Kebijakan ini meningkatkan jumlah siswa di sekolah tersebut, menyebabkan pemerataan dalam pengisian rombongan belajar di setiap satuan pendidikan. Hal ini memberikan keuntungan positif bagi guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru karena mereka tidak perlu mencari pekerjaan tambahan di sekolah yang lain.

3. Peluang untuk Siswa Berprestasi

Perpindahan SMP ke provinsi, sebagai akibat dari penerapan zonasi, memberikan pelayanan lebih baik dan memastikan siswa tidak menumpuk di sekolah tertentu sehingga kualitas Pendidikan dapat ditingkatkan. Penerapan zonasi melibatkan semua sekolah di NTB, memastikan para siswa bersekolah sesuai tempat tinggalnya, hal tersebut mengakhiri istilah sekolah favorit, dan memberikan peluang kepada siswa berprestasi di luar zona.

4. Pengontrolan Orang Tua yang Lebih Baik

Sistem zonasi menghilangkan istilah sekolah favorit, mengatur pendaftaran sesuai zonasi, dan memberikan peluang kepada siswa berprestasi. Kebijakan ini mempermudah pengontrolan orang tua terhadap peserta didik. Pembatasan ini juga berkontribusi pada penghapusan diskriminasi dan memastikan distribusi (persebaran) siswa yang merata di berbagai sekolah.

5. Kesempatan untuk Peserta Didik Kurang Mampu

Zonasi memberikan kesempatan bagi peserta didik kurang mampu untuk belajar di sekolah favorit. Melalui metode pembelajaran dan fasilitas yang mendukung, kebijakan ini merubah potensi intelektual siswa yang sebelumnya terbatas. Hal ini sejalan dengan tujuan kesetaraan pendidikan.

6. Kemudahan Akses Peserta Didik

Kebijakan zonasi memberikan keuntungan signifikan bagi peserta didik yang berdomisili dekat sekolah. Reduksi keterlambatan siswa disebabkan oleh jarak tempat tinggal yang dekat, mengurangi ketergantungan pada transportasi, memberikan kemudahan dalam menempuh jarak tempat tinggal ke sekolah dan memfasilitasi perjalanan siswa ke sekolah.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru membawa dampak positif dengan fokus pada pemerataan, kesetaraan akses, dan peningkatan kontrol orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Dampak Negatif Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penurunan Minat Belajar dan Kualitas Siswa

Kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat berdampak negatif terhadap minat belajar siswa, terutama bagi mereka yang memiliki potensi akademis tinggi dan berintelektual tinggi. Faktor-faktor seperti lingkungan sekolah, teman, fasilitas, dan metode pengajaran guru dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pembatasan pilihan sekolah berdasarkan zonasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, yang berujung pada penurunan minat belajar dan potensi siswa, mengakibatkan berkurangnya kualitas dan potensi siswa. Selain itu, fokus pada pemerataan daripada kualitas dapat menyebabkan

menurunnya kompetensi setiap sekolah dan menyebabkan ketidakseriusan siswa dalam pembelajaran.

2. Kurangnya Pendapatan Sekolah BOS

Penurunan jumlah siswa akibat kebijakan zonasi dapat berdampak langsung pada pendapatan sekolah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun dana BOS diarahkan untuk peningkatan fasilitas, penurunan jumlah siswa dapat menghambat pengelolaan dana tersebut, memengaruhi kualitas dan ketersediaan fasilitas sekolah. Kebijakan zonasi memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, menyebabkan sekolah menjadi lebih heterogen, dan membatasi hak individu dalam memilih sekolah sesuai minat dan bakatnya.

3. Heterogenitas Sekolah dan Pembatasan Hak Memilih

Kebijakan zonasi menciptakan heterogenitas di antara sekolah dengan melihat profil siswa dari berbagai latar belakang. Meskipun ini dapat membuka wawasan tentang keberagaman, namun pembatasan terhadap minat, bakat, dan preferensi individu dalam memilih sekolah bisa dianggap sebagai pengurangan hak.

4. Tantangan Integrasi bagi Siswa Miskin

Siswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin menghadapi tantangan integrasi di sekolah baru. Harapan dan kebiasaan belajar di sekolah baru bisa menjadi beban bagi siswa miskin, memerlukan solusi untuk memastikan pengalaman belajar yang positif.

5. Masalah Demografis, Psikologis, dan Budaya

Kebijakan zonasi juga dapat menimbulkan masalah demografis, psikologis, dan budaya yang harus segera diatasi karena kalau tidak dapat memperlebar jurang kualitas pendidikan. Faktor-faktor seperti keberlanjutan ketimpangan kualitas pendidikan, ketidaknyamanan guru, dan ketidaksesuaian budaya dapat muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan ini. Sekolah favorit yang berlokasi di pusat kota bisa memperoleh pelayanan bermutu, sementara sekolah di pinggiran hanya mendapatkan kualitas sejalan dengan sistem zonasi. Ketidaknyamanan muncul dari guru yang terbiasa mengelola siswa berprestasi tinggi, sementara siswa dari keluarga miskin menghadapi budaya sekolah baru. Ini dapat menyebabkan frustrasi dan kendala integrasi bagi siswa dengan latar belakang ekonomi dan kemampuan akademis rendah.

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses mengartikan atau menafsirkan informasi yang diterima melalui indera manusia. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat gambar, membaca tulisan, atau mendengar suara tertentu, mereka akan menginterpretasikannya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki

dan relevan dengan pengalaman mereka. Dalam konteks penerimaan siswa baru di tingkat SMP, diterapkan sistem zonasi untuk menentukan tempat bagi peserta didik baru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan terhadap konsep sekolah favorit atau unggulan telah berubah dengan adanya kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Harapan siswa untuk bisa masuk sekolah yang baik berdasarkan prestasi akademisnya kini terancam, karena tidak lagi terdapat perbedaan antara sekolah yang dianggap favorit dan yang tidak. Pemerintah bertujuan agar semua sekolah memiliki kualitas yang merata, di mana prestasi calon siswa tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur dan perlu diseimbangkan secara merata.

Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pasal 15 menegaskan kewajiban sekolah untuk menampung setidaknya 90 persen siswa dari jumlah total peserta didik yang diterima, berasal dari zona terdekat sekolah. Masyarakat memiliki pandangan terhadap favoritisme, di mana banyak yang berharap anak-anak mereka dapat masuk sekolah favorit dengan berbagai cara. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru bertujuan utama agar anak-anak tidak perlu repot mencari transportasi karena mereka dapat sekolah sesuai dengan domisili, sehingga pemerintah tidak memberikan siswa sarana transportasi ke sekolah, dan jarak rumah ke sekolah dapat ditempuh dengan berjalan kaki, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kecelakaan.

Diklarifikasi oleh pemerintah, kebijakan zonasi mengharuskan seorang peserta didik hanya dapat mendaftar di sekolah yang berlokasi atau berada di daerah tempat tinggalnya, dan tidak diperbolehkan untuk mendaftar di luar wilayahnya. Kurangnya motivasi belajar anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk terpaksa bersekolah di tempat yang bukan pilihannya. Keberhasilan proses belajar mengajar di satuan pendidikan sangat tergantung pada kemauan anak untuk aktif dalam pembelajaran sehari-hari. Setiap satuan pendidikan memberikan layanan dengan perbedaan, dan melalui perbedaan tersebut, sekolah dapat menghasilkan kualitas dan jumlah siswa yang berbeda.

Dalam penelitian ini, digunakan teori Talcott Parson yang menegaskan aspek *Adaptation*. Pemerintah diharapkan untuk secara serius menangani masalah sistem kebijakan zonasi di tingkat SMP Sederajat guna mencegah ketidakseimbangan antara sekolah swasta dan negeri. Terbukti bahwa tidak ada sekolah yang dianggap favorit, sehingga setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam penerimaan siswa baru. Informan menyatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi satuan pendidikan yang selama ini mengalami kekurangan siswa baru, sehingga penambahan rombongan belajar terjadi di sekolah yang tidak dianggap favorit, menciptakan keseimbangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan orang tua terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru memiliki efek pemerataan di setiap sekolah, baik yang memiliki status negeri maupun swasta. Pada awalnya, jumlah siswa mengalami

penurunan sesuai dengan ketentuan pemerintah, menghindarkan terjadinya penumpukan siswa. Anak-anak berpotensi tinggi mengalami penurunan kualitas pendidikan karena mereka harus bersekolah di tempat yang bukan pilihan utama mereka. Kebijakan zonasi memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya bagi orang tua adalah kemampuan untuk lebih efektif mengontrol anak-anak mereka karena jarak tempat tinggal yang dekat, memungkinkan mereka mendapatkan informasi tentang perilaku anak-anak dengan cepat. Tujuan kebijakan zonasi untuk mencegah penumpukan siswa di sekolah tertentu juga memberikan kontribusi positif.

Di sisi lain, dampak negatifnya adalah kekhawatiran bahwa anak-anak berkompotensi tinggi mungkin tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah berkualitas tinggi, menyebabkan kekecewaan orang tua terhadap sistem zonasi. Kebijakan ini cenderung memunculkan pemerataan di antara sekolah yang dianggap favorit dan yang tidak, menunjukkan bahwa kompetensi setiap sekolah dapat menurun karena tidak hanya siswa yang berdomisili di sekitarnya yang memberikan kontribusi reputasi baik, tetapi juga siswa dari luar baik dalam aspek akademis maupun non-akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, R., Nurhakim, F., Kosim, K., Praptiwi, A., & Shalahuddin, I. 2022. Gambaran Motivasi Belajar pada Siswa Afirmasi di SMA Negeri 4 Garut. *Malahayati Nursing Journal*, Vol. 4, No. 12. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i12.7480>
- Bahri, A., Nawir, M., Syakur, A., & Junaidi, J. 2020. Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kec. Rappocini Makasar. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 16, No. 29. <https://doi.org/10.36456/bp.vol16.no29.a2264>
- Bintoro, R. F. A. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Dewi, A. A. I. R. M. 2020. Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 5.
- Dwi Gustiani, Aufarul Marom, H. N. 2022. Efektivitas Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat (Studi di SMA Katolik Pendowo Magelang). *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol. 5, No. 3.
- Ishak, D. C. S. 2020. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 18, No.2. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>
- Ishak, I., Mustami, Muh. K., & Baharuddin, B. 2022. Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Nazzama: Journal of Management Education*, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.24252/jme.v1i2.25912>
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. 2021. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah

- Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- Junika, T., & Syam, H. 2022. Manajemen Peserta Didik dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (MANAPI)*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.31958/manapi.v1i1.6046>
- Launuha, J., Armin Naway, F., & Sukung, A. 2021. Implementasi Sistem Zonasi. *Student Journal of Educational Management*. <https://doi.org/10.37411/sjem.v1i2.945>
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, & Wiryanto. 2022. Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 8, No. 3. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Murcahyanto, H. 2023. Penggunaan Media Whatsapp pada Pembelajaran serta Pengaruhnya terhadap Motivasi dan Gaya Belajar Siswa Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Elementary School (JOES)*, Vol. 6, No. 1, Hal: 13–30.
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & KD, D. S. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1410>
- Permendikbud. 2018. UU NO 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. In *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Rahmawati, A., & Muflhatin, M. 2019. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p56-61>
- Safitri, M. A., & Yusran, R. 2021. Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 1. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>
- Santoso, N. E., & Ambarwati, S. 2020. Implementasi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Siswa Papua dan Papua Barat di SMK Negeri 2 Jember. *Prosiding National Simposium & Conference Ahlimedia*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.47387/nasca.v1i1.23>
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. 2021. Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Jumped (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>
- Widayanti, R. S. 2022. Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.10039>